

BAB II

GAMBARAN PARA AKTOR

2.1 Profil Perusahaan

PT Aek Tarum merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Sampoerna Agro Tbk yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit (PT Sampoerna Agro Tbk).¹ PT Sampoerna Agro Tbk merupakan perusahaan agribisnis nasional yang berfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak sawit mentah (CPO). Perusahaan ini memiliki berbagai entitas anak yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat dan Kalimantan barat. Salah satu anak perusahaan yang memiliki peran penting dalam sistem produksi terintegrasi adalah PT Aek Tarum. Unit ini berada di wilayah Belida dan Mesuji, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun serta operasional pabrik kelapa sawit (PKS) belida. Sebagai Holding Company atau perusahaan induk, PT Sampoerna Agro Tbk telah menetapkan arah yang strategis serta sistem operasional yang menjadi standar acuan bagi seluruh anak perusahaannya, termasuk PT Aek Tarum. SGRO menjalankan strategi integrasi hulu-hilir, yakni dengan mengelola proses dari budidaya kelapa sawit hingga pengolahan hasil panen secara langsung. Strategi ini tentu bertujuan untuk menjamin efisiensi operasional, pengendalian kualitas, serta kepastian pasokan bahan baku. Dalam hal ini, PT Aek Tarum berperan sebagai unit produksi di wilayah Sumatera Selatan yang menyuplai CPO dari hasil kebun inti dan plasma.

2.2 Sejarah Hadirnya PSR, Jenis Petani, dan Peran Pemerintah

PT Aek Tarum merupakan salah satu anak perusahaan tersebut yang didirikan pada tahun 1976 dan memiliki unit operasional utama bernama PKS Belida yang berlokasi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera selatan. PT Aek Tarum memiliki peran strategis dalam rantai

¹ PT Sampoerna Agro Tbk. *PT Aek Tarum*. Diakses dari <https://www.sampoernaagro.com/>

produksi kelapa sawit nasional, mulai dari budidaya tanaman sawit hingga pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi produk utama seperti *Crude Palm Oil* (CPO), Palm Kernel (PK), dan Palm Kernel Oil (PKO), (PKS Belida, 2013a). Melalui kemitraan dengan koperasi dan petani plasma seperti KUD Citra Sawit Mandiri, PT Aek Tarum bertindak tidak hanya sebagai salah satu penyedia bibit, pembimbingan dan pelatihan teknis, namun juga memastikan jaminan pasar hasil panen petani.

Tentu kegiatan operasional perusahaan tetap tunduk terhadap peraturan atau regulasi nasional. Salah satunya yakni Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang mewajibkan perusahaan perkebunan berskala besar untuk mengalokasikan minimal 20% dari lahan mereka bagi pembangunan kebun rakyat atau plasma (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Posisi PT Aek tarum sebagai aktor inti dalam kemitraan ini menjadikannya faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah tersebut. Salah satu komoditas utama yang berperan besar dalam perekonomian nasional saat ini adalah kelapa sawit. Kelapa sawit penting karena tanaman ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam sektor ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya petani sawit di pedesaan. Petani kelapa sawit sendiri merupakan orang atau sekelompok masyarakat yang menanam dan merawat kelapa sawit untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS). Tandan Buah Segar ini nantinya akan diproses menjadi minyak sawit mentah (CPO – *Crude Palm Oil*) yang dapat digunakan untuk banyak produk, mulai dari minyak nabati hingga bahan baku industri lainnya. Terdapat beberapa jenis petani sawit, diantaranya petani plasma dan swadaya. Menurut Heru Angriawan (2024) Petani plasma merupakan petani yang bekerja sama dengan perusahaan besar atau perusahaan inti. Petani jenis ini mendapat bantuan berupa bibit yang baik, pupuk, hingga bimbingan dan edukasi teknis dari perusahaan inti, yang kemudian hasil panennya dapat langsung dijual ke perusahaan mitra.

Menurut data laporan (FORTASBI, 2024), Petani swadaya merupakan petani yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari perusahaan. Semua modal, bibit, pupuk, hingga perawatan, semua ditanggung petani itu sendiri. Hasil panennya pun dijual ke pengepul atau pabrik mana saja

yang mau membeli. Menurut Muharam, dkk. (2023), jika membandingkan produktivitas petani plasma dengan petani swadaya dalam industri kelapa sawit, tentu petani plasma jauh lebih unggul dibandingkan dengan petani swadaya. Hal ini dikarenakan petani plasma memiliki bimbingan teknis dari perusahaan inti, penggunaan bibit unggul, serta akses pupuk dan sarana produksi lainnya. Sedangkan petani swadaya seringkali mengalami kendala dalam mendapatkan input yang berkualitas, yang tentunya hal tersebut membuat hasil panen mereka jauh lebih rendah ketimbang petani plasma.

Petani plasma memiliki berbagai keuntungan dari kerja sama dengan perusahaan inti, diantaranya seperti akses pelatihan teknis, kredit pertanian, hingga jaminan pasar. Sedangkan petani swadaya dihadapkan oleh berbagai tantangan diantaranya seperti fluktuasi harga pasar, keterbatasan modal, hingga rendahnya akses terhadap teknologi pertanian. Petani swadaya memang memiliki kebebasan yang lebih dalam menentukan sistem budidaya mereka sendiri, mereka tidak memiliki standar *Good Agricultural Practice* yang diterapkan, namun mereka lebih rentan terhadap risiko pasar serta sering mengalami keterbatasan dalam penerapan teknologi pertanian modern. Sehingga hal tersebut membuat kesejahteraan dan produktivitasnya menjadi rendah ketimbang petani plasma. Berbicara mengenai petani plasma, tentu perlu untuk melihat sejarah dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan Inti Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang sudah hadir sejak tahun 1980-an. Tujuan dari program PIR ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan antara petani plasma dengan perusahaan inti (Info Aspek Pir).²

Program PIR kelapa sawit ini mulai dilakukan di Sumatera Selatan pada tahun 1980/1981, yang berlokasi di provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu pelopor awal dalam implementasi program tersebut. Melalui program PIR tersebut, petani plasma mendapatkan dukungan berupa bibit unggul, bimbingan dan pelatihan teknis, akses teknologi pertanian, serta

² Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEK PIR). *Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebagai skema kemitraan antara petani plasma dan perusahaan inti*. Diakses dari <https://infoaspekpir.com/tentang-aspekpir>

jaminan pasar untuk hasil panen mereka melalui perusahaan inti. Seiring dengan berjalannya waktu, program PIR di Sumatera Selatan sudah banyak mengalami perkembangan dan berbagai evaluasi. Program PIR telah melahirkan asosiasi petani yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) yang berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan petani plasma dan menjaga keberlangsungan kelapa sawit. ASPEKPIR pada awalnya berdiri di Riau pada tanggal 29 Oktober 2000 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham No. AHU 0076682.AH.01.07 tahun 2016.

Karena berbagai kebutuhan nasional, maka lahirlah ASPEKPIR Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2018 yang disahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012050.AH.01.07 pada tanggal 2 Oktober 2018. Kini ASPEKPIR telah memiliki 15 DPD I di Indonesia, diantaranya Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga Papua Selatan, dengan jumlah total anggota mencapai 450.000 anggota dengan luas lahan kelapa sawit yang dikelola mencapai 900.000 hektar¹¹. Selain itu, ada program yang bernama GRS BDPDKS yang merupakan singkatan dari Grand Riset Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Infosawit), Program tersebut merupakan program untuk mendukung pendanaan penelitian dan pengembangan kelapa sawit. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, hingga menciptakan inovasi baru dengan nilai yang lebih terhadap industri sawit, pemerintah, serta petani dan masyarakat.

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun terhadap pertumbuhan dan pengembangan kelapa sawit. Menurut Kementerian Pertanian RI (2023), Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58% dari total produksi global. Selain itu, Indonesia juga menjadi eksportir utama CPO dengan kontribusi ekspor sebesar 56% secara global. Tanaman kelapa sawit

(*Elaeis guineensis* Jacq) menjadi salah satu komoditas perkebunan yang mendapatkan perhatian besar di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai penghasil minyak nabati untuk produk makanan, minyak industri, dan bahan bakar nabati (*biodisel*). Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tentunya Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam memasarkan minyak sawit (CPO-*Crude Palm Oil*) dan inti sawit (PKO *Palm Kernel Oil*) baik di dalam maupun luar negeri.

Hadirnya industri plasma kelapa sawit ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga desa yang mungkin masih nganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Perkebunan plasma kelapa sawit dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, diantaranya dapat menjadi petani plasma, pekerja kebun, ataupun sektor pendukung seperti transportasi dan perdagangan hasil sawit. Tentu industri kelapa sawit sangat menjanjikan bagi masyarakat lokal. Hadirnya industri perkebunan plasma kelapa sawit ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat desa di sekitar perkebunan. Perusahaan perkebunan dapat meningkatkan dan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, hingga fasilitas kesehatan yang dapat mendukung sistem operasional mereka. Adanya pembangunan hingga peningkatan infrastruktur dari perusahaan perkebunan kelapa sawit ini nantinya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Kemudian sistem plasma dalam perkebunan kelapa sawit dapat memberi petani kesempatan untuk dapat mengakses berbagai teknologi pertanian yang lebih modern, pelatihan teknis, hingga bimbingan dari perusahaan inti. Petani plasma juga memiliki akses pada bibit unggul, pupuk bersubsidi hingga, metode pertanian yang lebih efisien. Hadirnya industri kelapa sawit ini membawa perubahan pada pola kehidupan sosial masyarakat, terutama pada interaksi antar warga dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Komunitas juga menjadi lebih terstruktur melalui koperasi unit desa dan kelompok petani yang berperan dalam mengatur lahan plasma. Petani yang tergabung dalam skema plasma tentu memiliki akses pasar yang lebih stabil ketimbang petani swadaya. Adanya jaminan harga dan pembinaan yang pasti dari perusahaan, pendapatan petani dapat lebih terjamin.

Perubahan-perubahan yang terjadi dari hadirnya industri perkebunan kelapa sawit dapat terlihat dari munculnya berbagai usaha seperti warung makan, bengkel, hingga toko pupuk yang mendukung operasional industri kelapa sawit. Kemudian hadirnya perkebunan plasma menarik para investor untuk mengembangkan usahanya di sekitaran kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga mendapatkan pemasukan dari pajak dan retribusi yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. Hadirnya industri kelapa sawit membawa banyak perubahan dan dampak sosial ekonomi terutama dalam meningkatkan ekonomi lokal hingga meningkatkan investasi dan pendapatan daerah. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang berjalan tanpa adanya mitra dengan perusahaan lain, sehingga hal ini membuat berbagai masalah datang seperti skala usaha yang sempit, akses terbatas terhadap modal dan teknologi, serta kesulitan dalam pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) (Kurniasari & Iskandar 2020). Tandan Buah Segar (TBS) sendiri seringkali mengalami fluktuasi harga sawit yang tidak stabil, karena sangat bergantung pada pasar global.

Ketika harga kelapa sawit sedang turun, petani plasma seringkali mengalami krisis ekonomi karena penurunan harga pasar yang drastis yang menyebabkan penurunan pemasukan mereka. Petani plasma saja dapat mengalami kondisi seperti ini, apalagi petani non plasma. Oleh karena itu, kemitraan antara petani dengan perusahaan dan lembaga lain sangat penting adanya dan sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan efisiensi usaha perkebunan sawit rakyat.

Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting bagi banyak kalangan, khususnya bagi petani kelapa sawit di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Namun ketika pohon kelapa sawit sudah tua atau sudah melewati usia 25 tahun, pohon kelapa sawit tersebut tidak akan dapat berbuah banyak lagi karena produksi Tandan Buah Segar (TBS) mulai menurun meskipun tanaman sawitnya masih hidup, sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas kelapa sawit. Hal tersebut tentu juga berimbas besar bagi para petani kelapa sawit karena dapat menurunkan penghasilan mereka. Jika tidak di *replanting* atau diremajakan, hasil panen akan berkurang dan tidak lagi ekonomis untuk dipertahankan. Maka dari itu, lahirlah program yang bernama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Menurut Dwi Kurniasari & Sutarmo Iskandar (2020), program Peremajaan Sawit Rakyat adalah proses pergantian tanaman kelapa sawit yang sudah lama dan sudah tua dengan bibit kelapa sawit yang baru dan lebih unggul guna meningkatkan produktivitasnya kembali agar hasil perkebunan dan kesejahteraan petani terjaga. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan peremajaan kebun yang sudah tidak produktif, dengan mekanisme kemitraan antara petani kebun (Plasma) dan perusahaan perkebunan (Inti) yang berperan sebagai mitra usaha. Dengan adanya program Peremajaan Sawit Rakyat, perkebunan dapat menggunakan bibit unggulan agar dapat meningkatkan produktivitasnya kembali. Kemudian bibit yang baru juga dapat menghasilkan minyak sawit dengan jumlah yang lebih besar ketimbang menggunakan bibit lama. Pohon sawit yang sudah tua biasanya rentan terkena hama atau penyakit yang dapat membuat busuk. Adanya *replanting* dapat membantu membersihkan tanaman sawit dari lahan dan menggantinya dengan tanaman sawit yang baru dan lebih sehat.

Pohon sawit yang sudah tua biasanya memiliki ukuran yang terlalu tinggi (diatas 12 meter), sehingga hal tersebut menyulitkan para petani ketika ingin memanen secara manual. Kemudian juga pohon sawit yang sudah terlalu rapat atau berdempetan juga dapat menghalangi cahaya matahari ke tanah, yang tentunya dapat mempengaruhi hasil panen. Melalui program ini, perusahaan inti bertindak sebagai developer dan bertanggung jawab atas pembangunan kebun serta pencairan dana. Selain itu, perusahaan juga harus memperkuat kelembagaan petani, seperti kelompok petani dan Koperasi Unit Desa (KUD), untuk meningkatkan hubungan dengan petani dan mempermudah proses produksi serta angsuran kredit. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan sebesar 5% agar meringankan beban petani dalam pengelolaan perkebunan (Priyatno, 2016). Menurut Aulifa (2019), Program Peremajaan Sawit Rakyat juga merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman yang sudah tua atau tidak produktif lagi dengan tanaman baru, baik secara menyeluruh maupun bertahap.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meregenerasi kembali tanaman kelapa sawit rakyat yang sudah tua atau

tidak produktif lagi, ataupun yang menggunakan bibit ilegal menjadi bibit unggul yang bersertifikat, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitasnya kembali, mensupport keberlangsungan kelapa sawit, mempermudah akses modal dan teknologi, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Harapannya, dengan adanya program Peremajaan Sawit Rakyat ini, dapat meningkatkan kembali produktivitas kebun rakyat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani, serta menjaga kestabilan dan keberlangsungan industri kelapa sawit di Indonesia. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau *replanting* yang baik dapat menerapkan *Good Agricultural Gap* (GAP) sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sistem *replanting* yang baik juga dapat menggunakan teknik *agroforestry* atau teknik ramah lingkungan dengan cara menggunakan pupuk organik dan konservasi tanah. Namun, program Peremajaan Sawit Rakyat atau *replanting* ini memberikan dampak sosial yang cukup signifikan bagi para petani, terutama dalam aktivitas sosial masyarakat.

Para petani yang terlibat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat menjadi tidak memiliki waktu lebih untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong hingga kegiatan keagamaan. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih berfokus mencari sumber penghasilan lain. Kemudian pada saat masa *replanting*, kemungkinan meningkatnya kasus kriminal seperti pencurian dan begal dapat terjadi akibat dari menurunnya pendapatan petani selama masa *replanting*. Pendapatan petani plasma menurun pada saat masa *replanting* karena mereka kehilangan penghasilan utama mereka dari kelapa sawit yang belum berproduksi. Beberapa petani bahkan terpaksa menunda pendidikan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi karena kesulitan finansial (Kurniasari & Iskandar 2020). Namun, bagaimanapun program Peremajaan Sawit Rakyat ini harus tetap dilakukan, karena apabila tidak perkebunan sawit akan kehilangan produktivitasnya hingga menurun drastis, yang tentunya akan berdampak pada harga dan pasokan minyak sawit secara global.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sebelumnya juga telah memberikan bantuan dana hibah untuk program peremajaan lahan sawit rakyat sebesar Rp30 juta per hektar. Namun,

sejak 1 September 2024, jumlah tersebut telah dinaikkan menjadi Rp60 juta per hektar. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan inisiasi dari pemerintah guna meningkatkan kembali produktivitas dari pohon kelapa sawit serta menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

2.3 Sejarah KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi sosial yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat oleh masyarakat dan kembali untuk masyarakat desa itu sendiri. Sejarah awal terciptanya KUD adalah pada tahun 1963, tepatnya ketika pemerintah kala itu memelopori pembentukan koperasi petani (koperta) di kalangan petani. Tujuan utama awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok, khususnya padi. Pada tahun 1966-1967, dikembangkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai lanjutan dari koperta. Kemudian pada akhirnya konsep pengembangan koperasi desa disatukan menjadi BUUD/KUD. Hingga akhirnya lahirlah KUD yang secara perlahan menggantikan peran BUUD secara penuh. Perkembangan KUD sangat pesat pada tahun-tahun awal. Hal tersebut tidak luput dari peran dan strategi pemerintah. Secara hukum, KUD berlandaskan pada prinsip koperasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong diatur dalam pasal 2, yang berbunyi: *"Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan."*

Koperasi Unit Desa (KUD) bergerak berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sudah ditetapkan secara internasional. Berikut beberapa prinsip utama yang menjadi landasan operasional KUD, diantaranya:

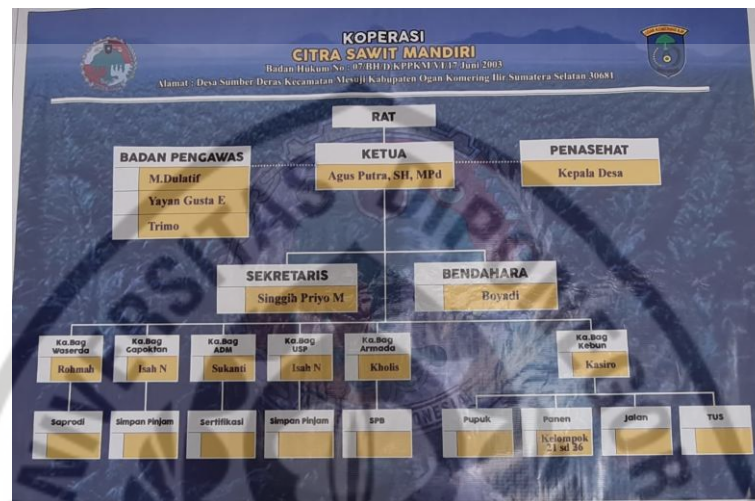
- Bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan secara demokratis
- Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa yang telah dilakukan masing – masing anggota

- Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal Kemandirian Pendidikan perkoperasian
- Kerja sama antar koperasi

Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman KUD dalam bergerak, bekerja, mengambil keputusan, serta ketika berinteraksi dengan anggota dan masyarakat. Penerapan prinsip tersebut tentu agar KUD tetap bergerak sesuai dengan nilai-nilai koperasi yang ada serta dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggotanya. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang bergerak di pedesaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama petani, nelayan, dan pengusaha-pengusaha kecil di desa. KUD secara umum berperan sebagai lembaga ekonomi yang mendukung anggotanya dalam berbagai aspek, diantaranya seperti memfasilitasi sarana produksi, pemasaran hasil pertanian, serta akses ke jangkauan yang lebih luas (permodalan dan teknologi). KUD juga memiliki peran strategis dalam membantu pembangunan ekonomi desa, hal ini dikarenakan KUD berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pasar, membantu dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, serta mensupport program pemerintah dalam sektor pertanian dan perkebunan. KUD dalam konteks perkebunan kelapa sawit sering menjadi mitra dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian membantu petani untuk memperoleh modal atau akses pendanaan, bibit unggul, serta training atau pelatihan teknis. Petani sawit akan sangat kesulitan apabila bergerak sendiri-sendiri atau perseorangan.

Namun jika mereka memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) yang solid dan kuat, tentu mereka akan mendapat sortir bibit dengan kualitas baik, pupuk yang cukup, serta dapat menjual sawit dengan harga yang lebih baik. Kinerja lembaga dalam Perusahaan Inti Rakyat sangat berperan penting dalam menentukan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Lembaga yang kuat akan meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung sistem agribisnis yang lebih kondusif (Priyatno 2016). Koperasi Unit Desa (KUD) diibaratkan “orang tua” bagi para petani sawit kecil, dimana Koperasi Unit Desa (KUD) membantu seluruh urusan petani sawit kecil agar para petani ini dapat fokus

pada penanaman hingga panen. Dalam PT Aek Tarum, terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) binaan yang membantu petani dalam membangun program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini, salah satunya yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Sawit Mandiri di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.1 KUD Citra Sawit Mandiri
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Koperasi Unit Desa (KUD) diibaratkan seperti “organ dalam” yang membantu petani dalam mendapatkan bantuan, regulasi, serta pasar yang lebih baik. Apabila Koperasi Unit Desanya kuat, maka tubuh luar atau sistem sosial petani sawitnya pun juga akan sehat dan dapat terus berkembang. Sebagai contoh, ada Koperasi Unit Desa (KUD) yang sangat aktif di salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Mereka membantu petani dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal atau dana untuk peremajaan sawit dari pemerintah, kemudian mereka juga memberikan bimbingan dan pelatihan tentang bagaimana cara menanam sawit yang benar. Alhasil petani di sana mampu memanen dengan jumlah yang lebih banyak dengan kualitas sawit yang lebih bagus. Hasil tersebut akan berbeda jika dibandingkan dengan desa-desa yang Koperasi Unit Desanya (KUD) kurang aktif, sehingga petani akan lebih kesulitan dalam mengikuti program ini dan sawitnya pun tidak bisa diremajakan dengan baik. Koperasi Unit Daerah (KUD) dan kelembagaan itu memiliki peranan yang sangat penting bagi para petani. Apabila mereka kuat,

maka petani pun akan dapat lebih mudah dalam mengikuti dan menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat ini, dan sawitnya pun dapat tumbuh lagi dengan yang baru.

2.4 Konsep Peran Para Aktor dalam Perspektif Antropologi Sosial

Dalam antropologi sosial kontemporer, konsep peran aktor mengalami pergeseran penting dari pandangan klasik yang hanya memposisikan manusia sebagai pusat tindakan sosial. Melalui pendekatan *Actor Network Theory* (ANT) yang dikembangkan oleh Bruno Latour, peran aktor dipahami sebagai hasil dari hubungan dan keterkaitan dalam suatu jaringan, bukan semata-mata berasal dari posisi formal, jabatan, atau struktur organisasi yang bersifat hierarkis. Dengan kata lain, peran aktor tidak melekat secara permanen pada individu atau institusi tertentu, melainkan terbentuk melalui relasi yang terus-menerus dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari. Menurut Latour (2005), aktor adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan dampak atau memengaruhi tindakan aktor lain dalam suatu jaringan. Aktor tidak dibatasi hanya pada manusia, tetapi juga mencakup aktor non-manusia seperti kebijakan, dokumen, teknologi, SOP, sistem administrasi, hingga material fisik seperti bibit unggul dan sarana produksi. Semua elemen tersebut diperlakukan setara dalam analisis, karena masing-masing memiliki kapasitas untuk mengarahkan, membatasi, atau memungkinkan tindakan sosial. Oleh karena itu, peran aktor dalam ANT selalu bersifat relasional, artinya peran hanya dapat dipahami melalui hubungan aktor tersebut dengan aktor lain di dalam jaringan.

Dalam perspektif ANT, peran aktor tidak ditentukan terlebih dahulu oleh struktur formal, melainkan muncul melalui proses keterhubungan dalam jaringan. Seorang aktor dapat memiliki peran yang kuat apabila ia mampu menghubungkan banyak aktor lain, menjaga alur informasi, serta memastikan stabilitas jaringan. Sebaliknya, aktor yang secara formal memiliki jabatan penting dapat kehilangan peran strategis apabila relasinya dalam jaringan melemah. Dengan demikian, peran aktor tidak bersifat statis, tetapi selalu dapat berubah mengikuti dinamika jaringan yang ada. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR tidak hanya

dapat dipahami sebagai program teknis yang dijalankan secara linear dari pemerintah ke petani, melainkan sebagai jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor manusia dan non-manusia. Petani plasma, pengurus KUD, perusahaan inti, pemerintah, regulasi PSR, dana BPD PKS, SOP *Best Management Practices* (BMP), hingga sistem administrasi dan dokumen legalitas lahan, semuanya saling terhubung dan berkontribusi dalam membentuk jalannya program. Dalam jaringan ini, peran aktor terbentuk dari bagaimana masing-masing elemen saling mengait dan bekerja sama. Dalam konteks ini, petani plasma dipahami bukan hanya sebagai penerima manfaat program, tetapi sebagai aktor aktif yang perannya sangat menentukan stabilitas jaringan PSR.

Kepatuhan petani terhadap SOP BMP, kelengkapan dokumen lahan, partisipasi dalam kegiatan koperasi, serta keterlibatan dalam proses *replanting* merupakan tindakan-tindakan yang dapat memperkuat atau justru melemahkan jaringan PSR. Petani yang tidak mengikuti standar atau tidak terhubung dengan alur administrasi dapat menyebabkan terhambatnya proses program, menunjukkan bahwa peran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan aktor kunci dalam jaringan.

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perspektif ANT menempati posisi yang sangat strategis sebagai simpul penghubung atau titik pertemuan berbagai aktor dalam jaringan PSR. KUD tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menghubungkan petani dengan perusahaan inti, pemerintah, serta berbagai aktor non-manusia seperti dokumen, sistem administrasi, dan alur pendanaan. Melalui peran ini, KUD menjadi pengatur alur informasi, mediator kepentingan, sekaligus penjaga stabilitas jaringan. Apabila KUD tidak mampu menjalankan fungsi penghubung tersebut, maka jaringan PSR berpotensi mengalami gangguan, meskipun dukungan kebijakan dan pendanaan tersedia. Perusahaan inti dalam jaringan PSR berperan sebagai aktor yang membawa standar teknis, pengetahuan agronomis, serta sistem pengawasan melalui penerapan BMP. Peran perusahaan tidak hanya hadir melalui interaksi langsung dengan petani, tetapi juga melalui aktor non-manusia seperti SOP, modul pelatihan, jadwal

monitoring, dan sistem digital perusahaan. Elemen-elemen ini mengarahkan cara petani dan KUD bertindak, sekaligus membentuk pola hubungan yang berlangsung dalam jaringan PSR. Dengan demikian, perusahaan inti tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk praktik sosial di tingkat lokal.

Pemerintah dalam perspektif ANT tidak dipahami semata-mata sebagai otoritas tunggal yang mengendalikan program, tetapi sebagai bagian dari jaringan yang bekerja melalui regulasi, skema pendanaan, dan prosedur administratif. Kebijakan PSR, aturan BPDPKS, dan persyaratan legalitas lahan bertindak sebagai aktor non-manusia yang memiliki daya pengaruh kuat terhadap jalannya program. Aturan-aturan tersebut dapat memperlancar atau justru menghambat pelaksanaan PSR, tergantung pada bagaimana aktor lain mampu terhubung dan menyesuaikan diri dengannya.

Dengan demikian, peran aktor dalam antropologi sosial berbasis *Actor-Network Theory* dipahami sebagai hasil dari keterkaitan antara manusia dan non-manusia dalam suatu jaringan yang terus bergerak dan dinegosiasikan. Keberhasilan atau kegagalan Program Peremajaan Sawit Rakyat tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat satu aktor secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai konsekuensi dari stabil atau tidaknya hubungan antar aktor dalam jaringan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menempatkan PSR sebagai fenomena sosial yang hidup, dimana peran KUD, petani plasma, perusahaan inti, dan pemerintah terbentuk melalui praktik, relasi, dan keterhubungan yang saling memengaruhi.

2.5 Profil Informan Penelitian

Dalam subbab ini, akan dijelaskan siapa saja informan yang terlibat dalam penelitian ini serta alasan dibalik pemilihan informan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, informan memegang peranan yang begitu penting karena data yang diperoleh berasal dari pengalaman dan pandangan langsung dari mereka. Oleh karena itu, profil informan penting untuk peneliti jelaskan agar pembaca dapat memahami dari sudut pandang peneliti dan mengapa informan tersebut dipilih. Informan dalam penelitian ini dipilih secara terencana atau

sengaja (*Purposive*) berdasarkan pengalaman dan keterkaitan mereka dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Artinya, disini informan dipilih bukan karena jumlahnya, melainkan karena mereka benar-benar terlibat, dianggap kompeten, dan memahami langsung baik secara teori maupun praktik dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lapangan. Dengan cara ini, diharapkan data yang diperoleh dari informan ini dapat memberikan gambaran nyata terkait kondisi dan hubungan jaringan komunikasi yang terjadi antar aktor dalam PSR. Secara umum, informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 sektor, yaitu petani plasma, pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), dan pihak perusahaan inti. Ketiga kelompok ini dipilih karena masing-masing memiliki peranan yang mendalam serta saling terikat dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat. Petani menjalankan peran di lapangan, kemudian KUD mengatur dan memfasilitasi setiap pertemuan, perusahaan inti memberikan pendampingan teknis maupun non teknis, hingga pemerintah sebagai pengatur kebijakan tertinggi.

2.5.1 Profil Informan Petani Plasma

Petani plasma menjadi salah satu informan dalam penelitian ini dikarenakan mereka adalah pihak yang paling merasakan langsung dampak dari program Peremajaan Sawit Rakyat. Petani plasma adalah petani kelapa sawit yang bekerja sama dengan perusahaan inti melalui KUD. Dalam program Peremajaan Sawit Rakyat, petani plasma menjadi pelaksana langsung dalam kegiatan peremajaan, mulai dari pengurusan administrasi hingga perawatan tanaman sawit yang baru ditanam. Petani plasma yang menjadi informan disini merupakan anggota KUD Citra Sawit Mandiri yang telah atau sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat. Mereka dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam proses peremajaan sawit, termasuk dalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi seperti masa tanaman belum menghasilkan hingga penerapan standar kebun yang telah ditetapkan perusahaan. Melalui petani plasma, peneliti ingin melihat bagaimana Peremajaan Sawit Rakyat dipahami dan dijalankan di

tingkat petani. Pandangan petani juga tidak boleh dipandang sebelah mata, karena ini juga menjadi bagian yang penting guna mengetahui bagaimana dampak peran KUD, perusahaan inti, dan pemerintah yang dirasakan oleh petani plasma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apakah membantu, menyulitkan, atau justru menjadi penentu keberhasilan program.

2.5.2 Profil Informan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD)

Pengurus koperasi unit desa (KUD) juga menjadi salah satu kelompok informan dalam penelitian ini. Pengurus KUD memiliki peran yang tidak kalah penting karena menjadi penghubung antara petani plasma dengan perusahaan inti. Dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat, KUD memiliki peran dalam mengurus administrasi, menyampaikan informasi, hingga membantu kelancaran koordinasi antar pihak. KUD dipilih sebagai salah satu informan karena mereka juga terlibat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat dan mereka ada dalam lingkaran yang saling terikat dengan aktor lainnya. Peran KUD tidak hanya sebatas pada urusan administrasi saja, namun juga sebagai tempat bagi para petani dalam menyampaikan keluhan kesah yang mereka alami, bertanya, hingga tempat mencari solusi. Oleh karena itu, padangan dari KUD juga sangat penting guna memahami bagaimana koperasi menjalankan fungsinya serta bagaimana perannya dalam mendukung keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat.

2.5.3 Profil Informan Perusahaan Inti

Informan dari pihak perusahaan inti dipilih karena mereka ikut terlibat dan menjadi bagian dari lingkaran program Peremajaan Sawit Rakyat. Perusahaan inti berperan dalam pendampingan teknis, pengawasan kebun, serta penerapan standar *Best Management Practices* (BMP) pada kebun petani plasma. Informan dari perusahaan inti yang peneliti tarik merupakan bagian lapangan atau pihak yang berhubungan langsung dengan petani dan pengurus KUD. Tentu mereka memahami

bagaimana kebijakan perusahaan diterapkan di lapangan serta bagaimana kondisi kebun plasma selama proses peremajaan sawit berlangsung. Pandangan dari tim perusahaan inti juga penting untuk peneliti ketahui guna mengetahui bagaimana perusahaan dalam melihat peran petani dan KUD dalam PSR, serta bagaimana hubungan kemitraan yang terjalin dan terjaga. Selain itu, tim perusahaan juga membantu peneliti dalam menjelaskan kendala teknis dan non teknis yang sering muncul dalam pelaksanaan program PSR.

Berdasarkan 3 kategori kelompok diatas, maka beberapa informan peneliti ajak untuk berbincang dan berdiskusi dalam rangka membantu menggali data untuk penyusunan penelitian ini. Adapun daftar nama, jenis kelamin, dan kategori informan yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kategori
1	Selamet	Laki-laki	Inti
2	Erwit	Perempuan	Inti
3	Toga	Laki-laki	Inti
4	Tande	Laki-laki	Inti
5	Teguh	Laki-laki	Inti
6	Singgih	Laki-laki	KUD
7	Ferry	Laki-laki	Inti
8	Har	Laki-laki	Petani Plasma
9	Kholis	Laki-laki	Warga lokal
10	Wayan	Laki-laki	Warga lokal